

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBANTU RUMAH TANGGA TERHADAP MORAL DAN KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Oleh : Vigo Akbar Risdiyan Putra

Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn

Pekerja/buruh di Indonesia saat ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat demi kelangsungan hidup mereka, ada berbagai macam jenis pekerja/buruh yang ada di Indonesia seperti contoh Pembantu rumah tangga (PRT).

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana konsep moral dan kesusilaan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Bagaimana perlindungan hukum bagi Pembantu Rumah Tangga (PRT) terhadap moral dan kesusilaan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk menganalisis konsep moral dan kesusilaan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban terhadap Pembantu Rumah Tangga.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Apabila melihat unsur-unsur pekerja baik berdasarkan pengertian secara terminologi dan yuridis, maka PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum memberikan perlindungan bagi PRT sebagai pekerja, bahkan tidak ada satu pasal pun yang memberikan perlindungan bagi PRT, walaupun dalam Pasal 1 angka 4 UUK menentukan yang termasuk pemberi kerja adalah orang perseorangan, dan dalam ketentuan pidana sering disebutkan dengan barang siapa.

Demikian juga pengaturan terhadap PRT juga belum seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengaturan ini tentu berbeda sesuai dengan adat budaya dan kebiasaan masing-masing daerah. Kondisi tersebut di atas menggambarkan selain tidak adanya perlindungan hukum yang kuat, juga menggambarkan tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini berdampak pada lemahnya bargaining pekerja rumah tangga berhadapan dengan majikannya di depan hukum.

Kata Kunci: Pembantu Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Moral dan kesusilaan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR HOUSEHOLD HELPERS ON MORALS AND decency in the perspective of LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING EMPLOYMENT

By: Vigo Akbar Risdiyan Putra

Main Advisor : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H

Companion Advisor : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn

Workers/laborers in Indonesia are currently one of the people's livelihoods for their survival. There are various types of workers/laborers in Indonesia, for example domestic helpers (PRT).

The problem formulation of this thesis is what is the concept of morals and decency according to Law Number. 13 of 2003 concerning employment and what is the legal protection for domestic servants (PRT) regarding morals and decency. The aim of this thesis research is to analyze the concept of morals and decency according to Law Number 13 of 2003 concerning employment and analyze the form of responsibility towards domestic servants.

The research method in writing this thesis is normative using a legislative approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

If you look at the elements of workers based on terminology and juridical understanding, domestic workers can be categorized as workers. However, Law Number 13 of 2003 concerning Employment does not yet provide protection for domestic workers as workers, in fact there is not a single article that provides protection for domestic workers, even though Article 1 point 4 of the UUK determines that employers are individuals, and in criminal provisions are often mentioned with whom.

Likewise, the regulation of domestic workers is not uniform across all regions of Indonesia. These arrangements certainly differ according to the cultural customs and customs of each region. The conditions mentioned above illustrate that apart from the absence of strong legal protection, it also illustrates the absence of legal certainty for domestic workers themselves. This has an impact on domestic workers' weak bargaining when dealing with their employers before the law.

Keywords: Domestic Workers, Legal Protection, Morals and decency